BAB II

A. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori kepastian hukum, kepastian merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan perilaku seseorang. Kepastian merupakan bentuk tercapainya tujuan dari hukum yang dapat dilaksanakan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum adalah, segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, beliau mendefinisikan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat (dalam satjipto, 2014 hal 53).

Kelsen mengutarakan pendapatnya tentang pengertian dari hukum, yakni bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dan memuat beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah aturan dasar atau pedoman yang mengikat masyarakat. Hukum umum mencakup aturan-aturan yang mengarahkan perilaku individu. Aturan-aturan tersebut merupakan pembatasan sosial terhadap individu atau perilaku. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaan peraturan tersebut telah memberikan kepastian hukum (Marzuki, 2008, hal. 158).

Utrecht menyatakan kepastian hukum. Dalam pandangannya, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, ada aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang bisa atau tidak bisa diambil. Kedua, memberikan kesewenangan pemerintah karena aturan. Secara umum, individu dapat mengetahui tuduhan atau tindakan yang mungkin dilakukan negara terhadap individu (Syahrani, 1999, hal. 23).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum terdiri dari tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) ataupun *doelmatigheid* ataupun keuntungan. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sehingga perlu diperhatikan. Keamanan dan ketertiban nasional dapat tercapai jika kepastian hukum harus dijaga dan hukum positif harus ditaati setiap saat. Nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan adalah nilai-nilai yang ingin kita capai berdasarkan teori kepastian hukum ini (Rato, 2010, hal. 95).

Kepastian hukum memastikan bahwa individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hukum. Ini

membutuhkan hukum yang ditulis secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan di dalamnya, tidak memberikan ruang bagi interpretasi atau diskresi sewenang-wenang. Selain itu, kepastian hukum mencakup gagasan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten oleh pengadilan dan otoritas hukum lainnya.

Dalam praktiknya, kepastian hukum dicapai melalui berbagai mekanisme, seperti legislasi yang jelas dan komprehensif, sistem peradilan yang berfungsi baik, prosedur hukum yang transparan, dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini juga menjadikan aturan hukum dan keputusan hukum dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum mereka.

Kepastian hukum memiliki manfaat dalam menjaga hak asasi manusia, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi konflik, menjaga keadilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi hukum, dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Aturan hukum yang jelas dapat memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan sama.

Dari teori kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa perwujudan pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dapat diberikan dengan adanya pedoman atau aturan mengenai sikap setiap orang. Dengan demikian, anak buah kapal yang bekerja di atas kapal asing mendapat kepastian hukum.

Pada awal abad ke-sembilan belas, menandai munculnya gerakan positivisme yang amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme bukan hanya muncul dalam bidang masyarakat, melainkan juga dalam bidang hukum sendiri. Aliran ini diberi nama positivisme yuridis untuk membedakannya dengan positivisme sosiologis.

Dinamakan positivisme, oleh sebab inspirasi dasar dalam aliran ini sama dengan inspirasi dalam positivisme sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam positivisme sosiologis hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran, demikian juga dalam positivisme yuridis. Dengan demikian, menurut aliran ini satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tatahukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya (Theo, 1993. Hal. 3). Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (selanjutnya disebut Soetandyo) aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan (Soentadyo, 2007. Hal. 2). adapun klaim kaum yurispositivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “perilaku” benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi. Terkait dengan kondisi di Indonesia maka persoalannya tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami bila saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara

kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.

Perkembangan masyarakat internasional di era global memunculkan kelompok moderat dengan teori koordinasi. Mereka menganggap bahwa HI memiliki lapangan berbeda sebagaimana hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. HI dan HN tidak bisa dikatakan terdapat masalah keutamaan. Masing-masing berlaku dalam areanya sendiri, oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah antara satu dengan lainnya. Pemahaman kelompok ini sebenarnya merupakan modifikasi dari paham teori dualisme. Menurut Anzilotti, bahwa hukum nasional ditujukan untuk ditaati sedangkan hukum internasional dibentuk dengan dasar persetujuan yang dibuat antar negara ditujukan untuk dihormati. (Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, 2006, Hal. 109).

Diperlukan strategi yang komprehensif terkait penanganan dan perlindungan ABK kapal ikan Indonesia di luar negeri. Strategi tersebut perlu mempertimbangkan aspek perekrutan dan penempatan yang melindungi calon ABK dari eksploitasi di luar negeri. Aspek perekrutan dan instrumen hukum perlindungan belum dituangkan sebagai strategi nasional yang terpadu. Belum adanya strategi penanganan yang komprehensif tersebut menyebabkan pihak yang berwenang belum dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada ABK di kapal penangkap ikan di luar negeri secara efektif.

Strategi penanganan dan perlindungan ABK merupakan tindakan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemangku kepentingan terkait ABK korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan pihak yang terlibat didalamnya dalam upaya memberikan perlindungan dan penanganan kasus sesuai dengan Rencana Aksi Nasional TPPO 2015 – 2019. Sebagaimana dipahami Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan isu lintas sektoral sehingga perlindungan dan penanganan kasusnya harus diselenggarakan dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Strategi perlindungan dan penanganan kasus ABK Indonesia terbagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu fase pra-kasus, fase terjadinya kasus, dan fase pasca kasus.

Fase pra-kasus adalah rangkaian tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ketika calon Anak Buah Kapal (ABK) akan/sedang mengikuti proses *recruitment* sampai proses penempatan oleh *manning agency* ke kapal penangkap ikan untuk bekerja di luar negeri. Adapun strategi yang diusulkan dalam fase ini adalah :

1. Aspek Pencegahan

- Menindaklanjuti 12 butir Rekomendasi *Focus Group Discussion* tentang Penyempurnaan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan ABK Kapal Penangkap Ikan di Luar Negeri, Yogyakarta, 22-23 Oktober 2014;
- Meningkatkan keterampilan dan kualitas calon ABK sektor perikanan dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai

proses rekrutmen, kondisi pekerjaan dan risiko yang akan dihadapi;

- Melakukan penataan terhadap manning agency yang mengirimkan ABK sektor perikanan;
- Mengembangkan pelatihan TPPO terhadap para pemangku kepentingan termasuk hakim, jaksa, polisi, pekerja sosial, dan diplomat;
- Memperkuat pengawasan dan inspeksi awal pada kapal ikan terkait kondisi kerja ABK Indonesia;
- Secara proaktif menindaklanjuti segala laporan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi penempatan/ pemberangkatan ABK Sektor Perikanan khususnya jalur non-prosedural/illegal; serta
- Menambah dan memperkuat Satuan tugas Pencegahan TKI Non-Prosedural.

2. Aspek Pengembangan Norma Hukum

- Menetapkan aturan khusus yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memberikan sertifikasi bagi agen yang akan menyalurkan ABK sektor perikanan. Aturan tersebut dibutuhkan untuk dapat menindak tegas agen yang disinyalir melakukan perekrutan illegal, pemalsuan dokumen, ataupun kegiatan lainnya yang mengarah pada TPPO;
- Melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan perekrutan dan penempatan ABK sektor perikanan;
- Menindaklanjuti dan mengawal ratifikasi beberapa aturan internasional yang terkait (MLC 2006, ILO c188, dan STCW-F 1995);

- Meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral terkait isu TPPO, khususnya dengan negara-negara yang terindikasi sering menjadi wilayah penangkapan ikan ABK Indonesia;
- Memperkuat *Mandatory Consular Notification* (MCN) dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara-negara di mana banyak ABK sektor perikanan Indonesia bekerja (wilayah maupun kapal);
- Mengarusutamakan isu penanganan TPPO ABK sektor perikanan pada masyarakat internasional; serta
- Secara proaktif mendorong pemerintah daerah yang teridentifikasi menjadi daerah sumber ABK Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Daerah terkait TPPO .

Tabel 2. 1 12 butir rekomendasi Focus Group Discussion tentang Penyempurnaan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan ABK Kapal Penangkap Ikan di Luar Negeri, Yogyakarta, 22-23 Oktober 2014. (*Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri, 2016, hal. 31-32*)

1. Perlunya koordinasi erat antar Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait untuk menentukan focal point dalam tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal di kapal penangkap ikan di luar negeri;
2. Mengusulkan definisi yang jelas terkait tenaga kerja yang bekerja di atas kapal ikan yang disepakati seluruh instansi terkait;
3. Perlunya harmonisasi dan sosialisasi peraturan nasional di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal penangkap ikan di luar negeri;

4. Ratifikasi *Work in Fishing Convention* (ILO C188) and *Recommndation* (C1 99) Tahun 2007 terkait perlindungan awak kapal ikan di luar negeri;
5. Ratifikasi Maritime Labour Convention Tahun 2006;
6. Memastikan isi Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Laut yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional;
7. Pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Laut yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional;
8. Ratifikasi *The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) Tahun 1995;
9. Mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan Pasal 28 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dengan menjadikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pemerintah ;
10. Pemerintah melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap izin operasional dan pembinaan agen perekrutan dan penempatan awak kapal ikan di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Sinkronisasi database pelaut secara online dengan memadukan database system yang dimiliki Kementerian Perhubungan dengan BNP2TKI;

12. Peningkatan kualitas awak kapal ikan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

Strategi fase terjadinya kasus merupakan rangkaian tindakan atau kebijakan ketika ABK Indonesia sedang mengalami kasus di kapal penangkap ikan. Adapun strategi yang diusulkan dalam fase ini adalah:

1. Aspek Penegakan Hukum

- Meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam menindaklanjuti laporan dari ABK yang tersangkut kasus, maupun dari pihak-pihak lainnya yang kredibel;
- Memastikan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam TPPO;
- Memaksimalkan upaya pendampingan kepada ABK termasuk penjemputan, pengantaran, pengumpulan keterangan;

- Memperkuat upaya-upaya yang dapat membantu proses hukum termasuk melakukan identifikasi awal petunjuk TPPO dan fasilitasi bantuan hukum; serta
- Meningkatkan pendekatan dengan pemangku kepentingan terkait di negara tempat kejadian TPPO termasuk penegak hukum setempat, kapten kapal dan korporasi yang bertanggung jawab terhadap kapal penangkap ikan.

2. Aspek Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi

- Memaksimalkan upaya pemulangan bagi ABK korban_ TPPO dari tempat kejadian di luar negeri ke Indonesia dengan merujuk pada peraturan yang berlaku;
- Memperkuat upaya identifikasi awal terhadap hak dan kewajiban ABK korban TPPO; serta
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait lainnya secara pro-aktif.

Strategi fase pasca kasus merupakan rangkaian tindakan atau kebijakan yang dilakukan setelah kepulangan ABK Indonesia korban TPPO ke daerah asal.

Adapun strategi yang diusulkan dalam fase ini adalah:

1. Aspek Penegakan Hukum

- Memaksimalkan upaya fasilitasi ABK untuk memperoleh restitusi yang sepadan; serta

- Meningkatkan sosialisasi aturan dan petunjuk teknis Penanganan Kasus TPPO bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pemangku kepentingan terkait seperti diplomat, imigrasi, pegawai pelabuhan dan lainnya.

2. Aspek Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi

- Memastikan ketersediaan bantuan medis dan psikologis bagi ABK korban TPPO dan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan ABK korban TPPO;
- Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus ABK korban TPPO;
- Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perkembangan kasus ABK korban TPPO;
- Memperkuat upaya reintegrasi sosial agar ABK korban TPPO tidak kembali pada lingkaran kasus yang sama; serta
- Memutakhirkan data ABK korban TPPO.

Tabel 2. 2 Pelaksana Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus (*Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri, 2016, hal. 34*)

Fase	Strategi	Pelaksana
Pra-Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pencegahan • Aspek Pengembangan Norma Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda terkait • Gugus tugas TPPO • Kementerian Perhubungan • KKP

		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • BNP2TKI • Ditjen Imigrasi • Kejaksaan Agung • Kepolisian RI • LSM/NGO
Terjadinya Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum • Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gugus Tugas TPPO • Kepolisian RI • Kejaksaan Agung • Kemlu • Perwakilan RI di LN • Kemsos • BNP2TKI • LSM/NGO
Pasca Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum • Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda terkait • Gugus Tugas TPPO • Kejaksaan Agung • Kepolisian RI • Kemsos

		<ul style="list-style-type: none"> • BNP2TKI • KKP • Kemhub • LSM/NGO
--	--	---

B. Teori Yurisdiksi

Asal kata Bahasa Indonesia “yurisdiksi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*jurisdiction*”. Sedangkan istilah *jurisdiction* dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “*yuris*” dan “*dictio*”. Secara garis besar, I Wayan Parthiana menyimpulkan bahwa yurisdiksi mengacu pada kepemilikan yang ditentukan oleh Undang- Undang, dan dapat juga diartikan sebagai “kekuasaan atau kewenangan hukum” dengan kata lain didalamnya tercakup; hak-hak yang harus berdasarkan hukum, kekuasaan dan kewenangan.

Teori yurisdiksi membahas kewenangan atau hak untuk menjatuhkan putusan hukum melalui pengadilan atau lembaga lainnya. Ada beberapa konsep utama dalam teori yurisdiksi, seperti yurisdiksi teritorial, pribadi, subjek, dan universal. Penerapan teori yurisdiksi memerlukan interpretasi yang hati-hati oleh pengadilan dan lembaga hukum untuk menjamin penerapan hukum yang konsisten dan adil untuk masyarakat yang semakin berkembang. yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat (Santoso, 2007, hal. 41). Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip

kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional.

Imre Anthoni Csabafi berpendapat bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik mencakup hak dari suatu negara mengatur dan mempengaruhi hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku- perilaku atau peristiwa melalui langkah atau tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang tidak semata-mata merupakan permasalahan dalam negeri (Sefriani, 2010, hal. 220).

Menurut John O'Brien, ada tiga jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat, yaitu:

1. Kewenangan negara untuk membuat Undang-Undang terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*Legislative Jurisdiction or Prospective Jurisdiction*);
2. Kewenangan negara untuk menegakkan ketentuan hukum nasionalnya (*Executive Jurisdiction or Enforcement Jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan Negeri untuk mengadili dan mengambil Keputusan Peradilan (*Judicial Jurisdiction*).

Dari teori Yurisdiksi dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, yurisdiksi dikaitkan dengan Negara maka Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja khususnya Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya. Pemberian kekuasaan ini dapat diukur, dalam arti luas dan kedalamannya dapat ditentukan. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan semacam ini disebut "hak". Jadi tidak setiap kekuasaan dalam

masyarakat itu disebut hak, tetapi hanya tertentu saja, yaitu yang diberikan kepada seseorang oleh hukum atau Undang-Undang. Suatu kepentingan tunduk pada suatu hak karena dilindungi oleh Undang-Undang dan juga adanya pengakuan (Rahardjo, 2014, hal. 53).

Menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), ia mendefinisikan hukum sebagai aturan hidup yang imperative untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. (Soeroso, 2020, hal. 20)

Menurut W. Lavensbergen, hukum pada dasarnya adalah peraturan yang terbatas pada perbuatan manusia. Menurutnya, hukum merupakan “*norma agendi*” yaitu norma yang bertindak atau mengatur tindakan manusia. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa W. Lavenbergen berpendapat bahwa objek hukum adalah perbuatan manusia dalam masyarakat (Soeroso, 2020, hal. 30).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan, sesuatu yang dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Misalnya, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan melalui penggunaan lembaga dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak

asasi manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan ketentraman.

Dapat di Tarik kesimpulan dari teori perlindungan hukum bahwa anak buah kapal yang bekerja di kapal asing berhak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya- upaya hukum harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar anak buah kapal mendapatkan hak-hak pada saat bekerja di kapal asing atau luar negeri.

Anak buah kapal adalah anak kapal selain Nakhoda. Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Nakhoda merupakan salah seorang berasal dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi pada kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Awak Kapal maksudnya orang yang bekerja ataupun di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik ataupun operator kapal guna melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia awak kapal memiliki arti anak buah kapal (perahu) (Arti Awak Kapal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di Lektur.ID, n.d.).

Pengertian anak buah kapal terdapat dalam Pasal 1 angka (40) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Anak buah kapal atau sering juga di sebut awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”.

Penafsiran awak kapal bagi syarat Pasal 1 Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, ialah: “Awak kapal berarti tiap orang yang dipekerjakan ataupun bekerja dalam kapasitas apapun ataupun melakukan pekerjaan di kapal penangkap ikan, tercantum mereka yang bekerja di kapal serta dibayar bersumber pada pembagian hasil tangkapan tetapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan senantiasa Pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melakukan tugas di kapal penangkap ikan serta pengamat awak kapal”.

Awak kapal terbagi menjadi beberapa bagian, para kepala bagian bertanggung jawab atas anak buah kapal sesuai dengan bagiannya. *Chief Officer* (Mualim I) adalah komandan bagian geladak, *Chief Engineer* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian geladak. *Chief Engineer* (Kepala Kamar Mesin) adalah komandan bagian mesin, *Chief Engineer* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian mesin kapal. *Chief Steward* (Kepala Bagian Perbekalan) adalah komandan bagian dapur kapal, *Chief Steward* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian dapur kapal. Nakhoda, sebagai pemimpin perjalanan, memiliki tanggung jawab utama baik untuk geladak, mesin maupun dapur kapal secara keseluruhan.

C. Asas Nasionalitas Aktif dan Pasif

Dalam hukum internasional, penentuan kewarganegaraan seseorang merupakan isu penting yang diatur melalui berbagai asas, di antaranya adalah **Asas Nasionalitas Aktif** dan **Asas Nasionalitas Pasif**. Kedua asas ini berperan dalam menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan kriteria tertentu yang berlaku di masing-masing negara. Penjelasan mengenai kedua asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Nasionalitas Aktif (*Active Nationality Principle*)

Asas nasionalitas aktif adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keterkaitannya secara aktif dengan suatu negara, baik melalui kelahiran di wilayah negara tersebut (*ius soli*) maupun melalui proses naturalisasi atau permohonan menjadi warga negara. Dalam asas ini, seseorang dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia memiliki hubungan hukum karena kelahiran atau pilihan individu tersebut.

Contoh penerapan asas ini adalah ketika seorang individu lahir di wilayah Indonesia, maka secara otomatis ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Begitu pula, seseorang yang mengajukan permohonan naturalisasi dan memenuhi persyaratan hukum akan diakui sebagai warga negara berdasarkan asas nasionalitas aktif.

2. Asas Nasionalitas Pasif (*Passive Nationality Principle*)

Berbeda dengan asas aktif, asas nasionalitas pasif menitikberatkan pada penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau hubungan hukum dengan orang tua, tanpa memperhatikan tempat kelahiran individu tersebut. Dengan kata lain, asas ini mengakui seseorang sebagai warga negara suatu negara jika orang tuanya (atau salah satunya) merupakan warga negara dari negara tersebut, meskipun individu tersebut dilahirkan di luar negeri.

Sebagai ilustrasi, seorang anak yang lahir di luar negeri dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan asas nasionalitas pasif. Hal ini mencerminkan prinsip **ius sanguinis**, yaitu kewarganegaraan ditentukan melalui darah atau keturunan.

3. Perbandingan Kedua Asas

Perbedaan mendasar antara asas nasionalitas aktif dan pasif terletak pada dasar penetapan kewarganegaraan:

- **Asas Nasionalitas Aktif** menekankan aspek **tempat kelahiran** atau **keputusan individu** untuk menjadi warga negara tertentu.
- **Asas Nasionalitas Pasif** berfokus pada **keturunan** atau **hubungan hukum dengan orang tua** yang telah memiliki kewarganegaraan.

Dalam praktiknya, banyak negara mengadopsi kedua asas ini secara bersamaan dalam sistem hukum kewarganegaraannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak kewarganegaraan seseorang, serta menghindari terjadinya status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*).

D. Konvensi Perbudakan (*Slavery Convention*)

Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling fundamental yang telah ada sejak masa lampau. Meskipun praktik perbudakan secara hukum telah dihapuskan di hampir seluruh negara, realitanya bentuk-bentuk perbudakan modern masih terus terjadi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, komunitas internasional telah mengesahkan sejumlah perjanjian internasional, yang secara khusus bertujuan untuk menghapuskan praktik perbudakan. Dua di antara konvensi utama tersebut adalah **Konvensi Perbudakan 1926** dan **Protokol Palermo 2000**.

1. Konvensi Perbudakan 1926 (*Slavery Convention, 1926*)

Konvensi ini merupakan tonggak awal dari upaya internasional dalam menghapuskan perbudakan secara global. Disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1926, konvensi ini mengatur berbagai aspek penting sebagai berikut:

- **Tujuan:** Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan, termasuk sistem-sistem sosial dan ekonomi yang menyerupai perbudakan. Negara-negara peserta diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna menghapuskan praktik tersebut di wilayah yurisdiksinya.
- **Isi Konvensi:** Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk memastikan bahwa perbudakan dalam bentuk apa pun dianggap ilegal dan harus dihapuskan. Selain itu, konvensi ini juga mengatur perlindungan terhadap individu yang menjadi korban perbudakan, serta pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat mengarah pada bentuk eksploitasi serupa.
- **Sistem Pengawasan:** Sebagai bagian dari implementasi, konvensi ini membentuk sistem pengawasan internasional, yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban negara-negara peserta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah disepakati.
- **Revisi Tahun 1956:** Pada tahun 1956, dilakukan penambahan berupa **Protokol Tambahan** terhadap Konvensi Perbudakan. Protokol ini memperluas cakupan konvensi dengan memasukkan isu-isu seperti

perbudakan anak dan perdagangan budak anak, serta menegaskan perlindungan hukum yang lebih luas bagi kelompok-kelompok rentan.

2. Protokol Palermo 2000 (*Palermo Protocol*)

Meskipun tidak secara langsung mengatur bentuk perbudakan tradisional, **Protokol Palermo** yang merupakan bagian dari **Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*)**, memiliki peran penting dalam pemberantasan perbudakan modern, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

- **Tujuan:** Protokol ini dirancang untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Fokus utama mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan seksual, dan eksploitasi anak.
- **Fokus pada Perlindungan Korban:** Salah satu aspek penting dari protokol ini adalah penekanan pada perlindungan hak-hak korban. Negara peserta diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan fisik, serta memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan dan pemulihan.

Signifikansi dan Relevansi Konvensi

Kedua konvensi tersebut memiliki peranan strategis dalam kerangka hukum internasional untuk menghapuskan perbudakan dalam segala bentuknya. Meskipun bentuk perbudakan klasik telah dilarang secara resmi, fenomena **perbudakan modern**—seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual—masih merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional.

Upaya internasional melalui instrumen hukum seperti Konvensi Perbudakan 1926 dan Protokol Palermo 2000 menunjukkan komitmen global dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan dunia yang bebas dari segala bentuk eksploitasi manusia.